PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

UNIT KERJA : **UNIVERSITAS LAMPUNG**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AYI AHADIAT**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR BIDANG PERENCANAAN, KERJA SAMA DAN SISTEM INFORMASI**
3. NHK : **798817**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp. 3.446.000.000

1. Tanah Seluas 3.436 m2 di KAB / KOTA PRINGSEWU, HASIL SENDIRI Rp. 211.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 854 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 482.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 2.275 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 647.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 375 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 366.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 3.633 m2/30 m2 di KAB / KOTA PRINGSEWU, HASIL SENDIRI Rp. 382.000.000
6. Tanah Seluas 579 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 293.000.000
7. Tanah Seluas 13.702 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 692.000.000
8. Tanah Seluas 734 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 373.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — Rp. 248.500.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 235.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SPD MOTOR SOLO Tahun 2019, HASIL

	SENDIRI Rp. 13.500.000		
C.	**HARTA BERGERAK LAINNYA**	**Rp.**	**30.000.000**
D.	**SURAT BERHARGA**	**Rp.**	**----**
E.	**KAS DAN SETARA KAS**	**Rp.**	**86.459.395**
F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**----**
	Sub Total	**Rp.**	**3.810.959.395**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**----**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**3.810.959.395**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.